

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul *Facilitating ASEAN Trade in Goods* membahas bagaimana kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi mesin ekonomi dunia, dengan ASEAN sebagai intinya. Integrasi mengarah pada peningkatan spesialisasi dan efisiensi, serta peningkatan saling ketergantungan antar ekonomi. Meskipun kemajuan telah dibuat dalam integrasi regional, negara tetap rentan terhadap tren ekonomi global. Pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat menyebabkan perlambatan di beberapa negara ASEAN, dan pengentasan kemiskinan juga akan terpengaruh. Adanya perdagangan regional di kawasan rentan terhadap guncangan harga komoditas dan nilai tukar, yang menimbulkan ketidakpastian bagi eksportir dan investor, mengurangi insentif untuk berinvestasi dalam penetrasi pasar. Selain tindakan non-tarif, mereka juga dapat memainkan peran penting sebagai hambatan dan ancaman potensial terhadap integrasi regional. Mengingat kerentanan ekonomi Asia Tenggara, regionalisme tidak memiliki landasan kelembagaan yang kuat.

ASEAN membuat fasilitas yaitu *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang telah tumbuh lebih efektif daripada banyak blok regional lainnya di dunia, perjanjian tersebut sarat dengan aturan yang rumit tentang asal produk, yang mengarah ke situasi “ mangkuk mie “. Negara-negara Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (ASEAN) terutama yang lebih kecil dan lebih miskin yang tidak termasuk dalam Kemitraan Trans Pasifik atau perjanjian bilateral besar dengan Uni Eropa

(UE) mungkin mengalami kerugian dalam hal daya tarik bagi negara asing. investasi, dan dapat mengambil risiko perlambatan permanen dalam pertumbuhan.

Dengan demikian, rezim perdagangan preferensial ATIGA tampaknya tidak begitu menarik bagi sektor swasta. Tingkat pemanfaatan yang rendah di antara banyak negara ASEAN, menunjukkan agenda fasilitasi perdagangan yang belum selesai, terutama pada dua isu utama. Dalam jurnal ini menyatakan bahwa adanya, efek mangkok mie menciptakan lingkungan yang saling bertentangan dan rumit dalam hal aturan asal di mana informasi terkadang sulit ditemukan oleh operator sektor swasta (terutama usaha kecil dan menengah), memecah pasar dan menghasilkan beban peraturan yang meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Dengan hal ini peneliti jurnal ini mengangkat masalah ROO, Transparansi dan perampangan NTM. Teori yang diambil tentunya adalah teori liberalisasi ekonomi dan regionalisme.

ROO ATIGA terdiri dari pilihan antara kandungan nilai regional 40% dan perubahan pos tarif atau subpos tarif. ROO ini memiliki efek penghambatan perdagangan yang substansial. Ini berarti bahwa ROO tampaknya meniadakan seperempat dari pengaruh margin preferensi tarif. Efek penghambat perdagangan dari ROO ATIGA sangat bervariasi di seluruh sektor.

Maka dari itu penelitian ini membahas mengenai pembentukan gugus tugas ROO di tingkat ASEAN dengan mandat untuk meninjau efek dari istilah yang penulis buat yaitu “ noodle bowl ” dari ROO dan merumuskan rekomendasi untuk perampangan dengan harus memperhitungkan keterkaitan yang krusial antara strategi akses pasar kawasan dengan ekonomi utama dari ASEAN sedangkan penelitian saya berfokus terhadap implikasi dari adanya ATIGA kepada proses

peningkatan ekonomi di kawasan ASEAN terutama pada negara-negara anggotanya. Jurnal ini memuat juga mengenai mekanisme kelembagaan yang ada di ASEAN untuk mendorong transparansi. ASEAN dan program dianggap sebagai pelatihan kolektif demi mempromosikan visi bersama. ASEAN memberikan fasilitas kerja sama bagi setiap negara-negara anggotanya,

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul *ASEAN : Regional Integration and Reforms* membahas mengenai tentang dampak perjanjian regional terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, perjanjian regional di antara mitra dagang alami, seperti dalam kasus ASEAN dan juga ASEAN +1, cenderung menciptakan perdagangan. ASEAN telah memajukan integrasinya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1992, ASEAN telah meluncurkan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), yang berkembang pesat. Ditahun 2003, ASEAN menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan tujuan untuk mencapai MEA yang telah disepakati pada tahun 2006. Dengan melihat empat tujuan didalam MEA yaitu pasar tunggal dan basis produksi, wilayah kompetitif, pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi ke dalam ekonomi global. MEA bisa dibilang lebih komprehensif daripada AFTA, dengan pilar pertama memiliki tujuan terhadap perdagangan baik barang, jasa, dan investasi yang lebih terbuka serta arus modal yang akan bertambah lebih besar. Sebagian besar fokus MEA ada pada pilar pertama dengan pencapaian utama adalah terciptanya *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2010 dan pengurangan tarif untuk sebagian besar perdagangan intra-ASEAN mendekati nol, terutama untuk ASEAN-6, yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Masalah yang diangkat oleh peneliti ini adalah menilai arah ASEAN

saat ini dan masa depan dalam konteks integrasi regional karena menghadapi ketidakpastian dan ekonomi global yang melambat. Dengan teori yang diangkat tentunya liberalisasi ekonomi, regionalisme, dan perdagangan internasional.

Pertumbuhan dan integrasi yang digerakkan oleh pasar adalah pendorong integrasi regional di Asia Tenggara, dan perjanjian perdagangan bebas adalah bagian penting dari integrasi ini. Asia Tenggara telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan bebas, salah satunya perjanjian perdagangan di ASEAN dan ASEAN+1, yang telah membantu mendorong pertumbuhan dan integrasi berbasis pasar di kawasan ini. Jurnal ini fokus pada pendalaman komitmen ASEAN saat ini dengan menyelesaikan target MEA yang sebagian belum tercapai pada 1 Januari 2016 dan sebagian besar harus dilaksanakan setelah tahun 2015. Cakupan tidak hanya pada barang, jasa, dan investasi, tetapi juga perlu memasukkan isu-isu di belakang perbatasan yang terkait dengan hambatan *non-tariff*, standar, pendalaman liberalisasi perdagangan, pergerakan profesional, perdagangan, dan fasilitasi visa.

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul **Implikasi Asean Economic Community Blueprint Terhadap Perkembangan Perdagangan Indonesia Ke Singapura** membahas mengenai bagaimana perdagangan luar negeri memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas politik kerja sama pembangunan ekonomi dan sosial adalah sebuah keharusan bagi setiap negara anggota. Regionalisme memiliki premis mendasar yaitu dengan adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama yang mendorong terjadinya perdamaian dan stabilitas. Dengan adanya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dirancang dapat membantu mengubah negara anggota pasar dan basis produksi

akan menjadi kawasan yang kompetitif dengan pembagunan ekonomi yang merata dan akan menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi kedalam perekonomian global.

Salah satu negara yang mempunyai kesiapan dalam menyikapi sebuah perdagangan bebas adalah negara Singapura. Dengan memiliki perekonomian yang kuat Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan sebuah penghalang bagi peningkatan pertumbuhan ekonominya melainkan sebuah peluang yang sangat besar bagi Singapura. Hubungan kerja sama dijalin kuat oleh Singapura dan Indonesia selain letak geografis hubungan ini diwujudkan dalam beberapa bidang kehidupan terutama dibidang ekonomi. Di kawasan ASEAN sendiri Singapura merupakan mitra dagang utama bagi negara anggota dengan sumber investasi asing terbesar dan juga merupakan sumber wisatawan mancanegara bagi Indonesia.

Permasalahan di dalam jurnal ini adalah bagaimana implikasi terhadap perekonomian Indonesia dan Singapura di kawasan ASEAN secara makro ekonomi kondisi atau persaingan antar daerah terlihat dari pendapatan asli daerah, negara alokasi investasi dan komposisi perdagangan internasional. Teori yang digunakan adalah liberalisasi ekonomi dan regionalisme.

Maka dengan jurnal ini membahas Indonesia dan Singapura telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi hambatan perdagangan dan hambatan non-tarif sesuai dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, untuk rancangan mendorong sebuah integrasi ekonomi dengan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hal ini akan membantu kinerja perdagangan Indonesia, dan mendorong perdagangan intra-ASEAN. Perdagangan antara dua negara yaitu Indonesia dengan Singapura semakin mengalami peningkatan , akan tetapi nilai ekspor Singapura masih lebih tinggi dari impor Indonesia. Pada tahun 2008-2010,

neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit karena impor Singapura melebihi ekspor produk energi dari Indonesia

Kesimpulan dengan disahkannya ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dengan mendeklarasikan cetak biru dengan memuat langkah-langkahnya. Dengan merealisasikan kebijakan yang ada didalamnya seperti melaksanakan fasilitas perdagangan dengan cangkupannya adalah adanya sebuah penghapusan hambatan non-tariff terhadap beberapa produk yaitu produk makanan, produk pertanian, produk makanan olahan dan juga Teknik kepabeanan modern sehingga barang yang diproduksi dapat memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan perekonomian dan perdagangan negara Indonesia.

Literatur keempat yaitu jurnal yang berjudul *Review of Intra-ASEAN Non Tariff Measures on Trade in Goods* membahas mengenai negara-negara ASEAN telah terlibat dalam saling menurunkan tarif, guna mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN selaku sebuah kelompok organisasi memiliki sebuah ikatan kerja sama perjanjian perdagangan dengan mitra diluar ASEAN seperti (Tiongkok, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan India). Pada saat yang sama, ASEAN tetap teguh mendukung WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan sistem perdagangan multilateral. Meskipun proses tersebut telah menyebabkan pengurangan substansial dalam hambatan perdagangan, langkah-langkah *non-tariff Measures* (NTM) yang penting telah muncul yang lebih sulit untuk diatasi.

Jurnal yang diterbitkan oleh ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) dilaksanakan sebagai bantuan untuk memahami seberapa umum dan pentingnya sebuah hambatan yang terjadi pada perdagangan di kawasan ASEAN.

Sebagai tugas yang penting proyek ini diharuskan melakukan sebuah survey tentang NTB (hambatan non-tarif) yang ada di beberapa perusahaan lokal atau multinasional, asosiasi industri atau ruang dagang dan federasi lain dari industri pengekspor dan jasa ke beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam serta di luar pasar ASEAN dengan berfokus pada kasus Filipina. Dan teori yang digunakan adalah liberalisasi ekonomi dan perdagangan internasional.

Meskipun kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam pembukaan pasar melalui penghapusan tarif, penanganan masalah non tarif (NTMs) tetap ada. Dengan pengurangan tarif di seluruh dunia, perhatian yang meningkat telah beralih ke efek NTM ini yang hanya menjadi hambatan non-tarif untuk perdagangan. Tindakan Non-Tarif (NTM) dapat dibenarkan karena berbagai alasan seperti kesehatan, keamanan, lingkungan, dan perlindungan konsumen. Namun, mereka dapat berdampak buruk pada rantai produksi global dan regional dengan meningkatkan biaya melakukan bisnis yang tidak perlu.

Penelitian ini mengulas studi-studi yang ada dalam Tindakan Non-Tarif untuk pemahaman yang lebih baik tentang implikasi NTM terhadap perdagangan internasional serta bisnis lokal dan untuk mengusulkan beberapa cara ke depan. Sebagai wawasan tambahan, penelitian ini menyajikan hasil survei sampel kecil (persepsi) di kalangan eksportir tentang jenis NTM yang dihadapi di dalam dan di luar ASEAN dan dampak biaya operasi yang dirasakan dari NTM. Dengan melakukan sebuah dapat mengidentifikasi tiga utama yang berdampak kepada pelaksanaan bisnis mereka baik di dalam maupun di luar ASEAN yaitu: Formalitas Kepabeanan, Ketentuan Asal Barang, dan Hambatan Teknis Perdagangan.

Literatur kelima yaitu jurnal yang berjudul **Analisis Dampak Integrasi Ekonomi Asean Terhadap Ekspor Sektor Pertanian Di Indonesia** membahas mengenai meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan biaya perdagangan internasional dalam mendorong kesadaraan integrasi ekonomi regional. Pembahasan mengenai bagaimana dampak yang terjadi akibat integrasi ekonomi ASEAN terhadap bidang perdagangan disektor pertanian khususnya di Indonesia. Dengan perjanjian yang dilaksanakan yaitu *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang merupakan sebuah ruang Kerjasama dibidang ekonomi dengan tujuan utama adalah mengurangi dan menghilangkan banyaknya hambatan perdagangan yang berlaku di perdagangan kawasan terutama di negara-negara anggota ASEAN dengan diharapkan adanya peningkatan arus barang antara negara anggota ASEAN.

Dengan memiliki beberapa mekanisme yang dikeluarkan oleh AFTA salah satunya adalah *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) merupakan sebuah mekanisme yang dibuat untuk menekankan penghapusan dan pengurangan sebuah tarif dan non tarif untuk suatu produk pertanian dan manufaktur. Barang yang diimpor dari luar kawasan ASEAN akan memiliki bea yang cukup tinggi dibandingkan dari bea yang masuk diantara anggota ASEAN yang relatif lebih rendah. Memiliki sebuah prinsip yaitu *Most Favourable Nations* (MFN) merupakan mekanisme penurunan tarif CEPT yang mengenai bea masuk terhadap barang-barang impor yang masuk dari suatu negara ke negara lainnya.

Dengan memuat dan mengangkat masalah tentang bagaimana dampak yang dihasilkan terutama kepada sektor perdagangan yaitu pertanian khususnya di Indonesia dengan adanya integrasi ekonomi yang dilakukan ASEAN dengan disahkannya kebijakan perjanjian AFTA dan beberapa faktor yang dapat



mempengaruhi perdagangan itu sendiri. Dengan melihat bagaimana perdagangan sektor pertanian Indonesia terutama dengan negara-negara anggota ASEAN dan luar kawasan ASEAN. Dengan teori-teori yang dikeluarkan oleh penelitian ini adalah perdagangan internasional yang lebih mendalam mengenai Absolute Advantage dan juga Regionalisme yang membahas bagaimana sebuah integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Menggunakan model gravitas dalam menganalisis perdagangan yang dilakukan secara bilateral antar negara Indonesia dan negara anggota ASEAN dengan beberapa mitra dagang utama yang khususnya di sektor pertanian. Dengan menggunakan hasil akhir dari total ekspor sektor pertanian sebagai variabel dependen dan meliputi juga variabel PDB perkapita negara pengekspor, dummy importir dan juga sebuah inflasi negara dalam pelaksanaan AFTA.

Hasil akhir dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya variabel nilai tukar riil, inflasi negara yang mengimpor dan negara ASEAN memiliki pengaruh dan dampak signifikan yang relatif positif terhadap ekspor di sektor pertanian negara Indonesia. Lalu dampak yang terjadi pada PDB per kapita negara yang mengekspor, jarak dan inflasi yang terjadi di negara pengekspor berpengaruh signifikan dan relatif negatif terhadap ekspor sektor pertanian yang terjadi di Indonesia. Lalu dampak PDB per kapita negara yang melakukan import tidak berpengaruh signifikan terhadap negara ekspor di sektor pertanian di Indonesia.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Teori</b>                                | <b>Masalah</b>  | <b>Kesimpulan</b>  |
|-----------|---|---|---|--|
| <b>1</b>  | <i>Facilitating ASEAN Trade in Goods</i><br>(Cadot & Ing, 2017) | Liberalisasi<br>Ekonomi dan<br>Regionalisme | Bagaimana cara ASEAN memfasilitas kemajuan perekonomian melalui agenda perdagangan di kawasan ? | Membentuk gugus tugas ROO di tingkat ASEAN dengan mandat untuk meninjau efek mangkuk mie dari ROO dan merumuskan rekomendasi untuk perampingan. Hal ini harus mempertimbangkan hubungan penting antara strategi akses pasar kawasan dengan perekonomian utama Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan kebutuhan akan pembangunan regional yang seimbang adalah penting. |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 2 | <p><i>ASEAN : Regional Integration and Reforms</i> (Pangestu &amp; Ing, 2016)</p> | <p>Liberalisasi Ekonomi, Regionalisme dan <i>Internasional Trade.</i></p> | <p>Bagaimana arah ASEAN saat ini dan masa depan dalam konteks integrasi regional dalam menghadapi ketidakpastian dan ekonomi global yang melambat ?</p> | <p>Perjanjian regional di antara mitra dagang alami, seperti antara ASEAN dan ASEAN+1, cenderung mempromosikan perdagangan dengan menciptakan peluang baru untuk perdagangan. Pengalaman ASEAN dan ASEAN+1 menunjukkan bahwa proses masuknya kesepakatan ini sangat penting, karena juga mendorong reformasi unilateral dan domestik. Dulu, ASEAN dipandang sebagai tempat latihan untuk bersaing dengan negara tetangga terlebih dahulu sebelum bersaing secara global. Oleh karena itu, proses perluasan dan</p> |
|---|---|---|---|--|

|          |   |                                       |   |  |
|----------|---|---------------------------------------|---|--|
|          |   |                                       |   | pendalaman AEC yang sedang berlangsung, termasuk konsolidasinya ke dalam RCEP, harus terus mengkonsolidasikan upaya reformasi dan pembangunan kelembagaan di Asia Timur.   |
| <b>3</b> | Implikasi <i>ASEAN Economic Community Blueprint</i> Terhadap Perkembangan Perdagangan Indonesia Ke Singapura (Yufani, 2014) | Liberalisasi Ekonomi dan Regionalisme | Bagaimana implikasi terhadap perekonomian Indonesia dan Singapura di kawasan ASEAN secara makro ekonomi kondisi atau persaingan antar daerah dengan melihat dari pendapatan | Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa disahkannya deklarasi yang berisi cetak biru Memiliki implikasi yang relative positif terutama pada perekonomian dan perdagangan Indonesia akibat adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan berkembangnya perekonomian dikawasan ASEAN |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>murni daerah, negara tempat investasi dan perdagangan internasional ?</p> | <p>berdampak positif khususnya bagi negara Singapura semakin mengalami peningkatan dan berkembang. Perdagangan Indonesia terbawa berkembang dengan adanya hal ini, akan tetapi nilai ekspor negara Singapura-Indonesia masih kalah dengan negara negara anggota ASEAN yang lebih dapat dirasakan oleh negara Singapura, Malaysia dan Thailand. Karena khususnya Indonesia belum dapat memaksimalkan keuntungan yang seimbang dibandingkan negara-negara anggota lainnya terutama Singapura. Maka dengan</p> |
|--|--|--|--|---|

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
|          |   |   |  | itu Indonesia harus mengambil Langkah yang jauh lebih kreatif dan strategis di setiap sektor yang mampu meningkatkan persaingan antara produk di kawasan ASEAN, khususnya Singapura.   |
| <b>4</b> | <i>Review of Intra-ASEAN Nontariff Measures on Trade in Goods</i> (Medalla & Mantaring, 2017) | Leberalisasi Ekonomi dan <i>International Trade</i> | Bagaimana nontarif Intra-ASEAN melakukan Tindakan perdagangan barang ? | Sebagian besar NTM ini ditujukan untuk alasan yang dapat dibenarkan seperti sanitasi dan kesehatan, lingkungan, keamanan, dan perlindungan konsumen. Selain itu, dengan meningkat mungkin lebih merupakan hasil dari kesepakatan yang lebih memiliki dampak besar oleh negara-negara anggota ASEAN pada memberitahukan , dan |

|    |                 |                           |                  |  |
|----|-----------------|---------------------------|------------------|--|
|    |                 |                           |                  | <p>angka tersebut yang tidak memiliki kepastian dalam menunjukkan tingkat pembatasan NTM ini. Namun, ada juga kekhawatiran yang masuk akal bahwa NTM ini secara efektif sebagian besar adalah NTB yang lebih bersifat proteksionis. Dan seperti yang ditunjukkan oleh tren naik, ini bisa menjadi semakin intensif juga. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih dekat tentang motif dan implementasi serta administrasi NTM ini, terutama yang memiliki kemungkinan efek NTB.</p> |
| 5. | ANALISIS DAMPAK | Perdagangan internasional | Bagaimana dampak | ASEAN diketahui memiliki pengaruh  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| INTEGRASI<br>EKONOMI<br>ASEAN<br>TERHADAP<br>EKSPOR<br>SEKTOR<br>PERTANIAN<br>DI<br>INDONESIA(<br>Puspita, 2014) | ( <i>Absolute<br/>Advantage</i> )<br>dan<br>Regionalisme | integrasi<br>ekonomi<br>ASEAN<br>terhadap<br>perdagangan<br>sektor pertanian<br>di Indonesia<br>setelah<br>diberlakukannya<br>AFTA ? | positif dan signifikan<br>terhadap ekspor sektor<br>pertanian di Indonesia.<br>sehingga apabila<br>variable-variabel tersebut<br>mengalami peningkatan,<br>maka nilai ekspor sektor<br>pertanian di Indonesia<br>juga akan meningkat. |
|--|--|--|---|

## 2.2. Kerangka Teoritis

### 2.2.1. Liberalisasi Ekonomi

Liberalisasi ekonomi muncul sebagai kritik terhadap otoritas politik dan kontrol atas isu-isu ekonomi yang mendominasi pendirian negara-negara Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Ekonom liberal menolak teori dan kebijakan yang mensubordinasikan ekonomi ke politik. Adam Smith, pendiri liberalisme ekonomi, percaya bahwa pasar secara alami berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia, tanpa campur tangan pemerintah. Smith juga menguraikan prinsip-prinsip dasar liberalisme ekonomi, termasuk aktor individu yang rasional, keyakinan akan kemajuan, dan pengakuan atas keuntungan bersama. Namun, Smith juga menambahkan idenya sendiri pada pemikiran liberal, menekankan ekonomi pasar sebagai pendorong utama kemajuan, kerja sama, dan kemakmuran. Sebaliknya, campur tangan politik dan penyelenggaraan negara dianggap tidak efisien, regresif,



dan dapat menimbulkan konflik. Doktrin dan prinsip ekonomi liberal didasarkan pada keyakinan bahwa jika dibiarkan sendiri, pasar bebas akan menghasilkan hasil terbaik untuk semua. Salah satu prinsip ekonomi liberal adalah "hukum keunggulan komparatif", yang menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menghasilkan penggunaan sumber daya yang paling efisien dan kemakmuran yang lebih besar bagi semua yang terlibat.

Ekonom liberal memegang keyakinan bahwa pasar bukan negara yang merupakan agen paling efektif untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Mereka memandang pasar sebagai ruang terbuka di mana individu dapat terlibat dalam pertukaran barang dan jasa. Individu-individu ini dianggap rasional, dan ketika mereka menerapkan rasionalitas mereka di pasar, semua peserta mendapatkan keuntungan. Pasar dipandang sebagai "*Positive Sum Game*", yang berarti bahwa setiap orang yang terlibat mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya. Individu dan perusahaan hanya akan berpartisipasi di pasar jika menguntungkan bagi mereka. Ekonom liberal berpendapat bahwa menganggap individu sebagai rasional dan mementingkan diri sendiri dapat berfungsi sebagai titik awal untuk memahami tidak hanya ekonomi pasar tetapi juga politik..

Perspektif yang dikenal sebagai "teori pilihan rasional" ditolak oleh kaum liberal, yang tidak setuju dengan keyakinan merkantilis bahwa keuntungan ekonomi satu negara datang dengan mengorbankan kerugian ekonomi negara lain. Cara paling efektif untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan manusia adalah melalui perluasan ekonomi pasar bebas dan kapitalisme, tidak hanya di dalam masing-masing negara tetapi juga melintasi batas-batas internasional.

Ada perdebatan yang sedang berlangsung di antara para ekonom liberal mengenai sejauh mana intervensi pemerintah diperlukan untuk menjamin pasar bebas. Ekonom liberal awal, disebut sebagai "liberal", mendukung prinsip pasar bebas dan menganjurkan pemerintahan terbatas tanpa batasan atau regulasi politik. Namun, kaum liberal sebelumnya mengakui perlunya kerangka hukum untuk menegakkan pasar bebas. Konsep prinsip pasar bebas tidak mengimplikasikan tidak adanya regulasi politik; sebaliknya, ini berarti bahwa negara hanya akan menawarkan landasan penting yang diperlukan untuk berfungsinya pasar bebas dengan baik.

John Stuart Mill, meskipun terutama seorang ekonom liberal *laissez-faire*, menyatakan kritik terhadap perbedaan yang signifikan dalam pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan yang terlihat di Inggris abad ke-19. Akibatnya, ia menganjurkan intervensi pemerintah yang terbatas dalam aspek-aspek tertentu. Demikian pula, menurut Keynes, sementara ekonomi pasar menawarkan banyak manfaat bagi individu, ekonomi pasar juga menghadirkan potensi kelemahan karena ketidakpastian dan kelalaian. Untuk mengatasi hal ini, Keynes mengusulkan perlunya tata kelola politik pasar yang lebih baik, menyarankan agar negara mengatur pasar dengan cara yang cerdas (Keynes, 1963).

Ekonom liberal berpendapat bahwa ekonomi pasar berfungsi sebagai entitas yang terpisah dalam masyarakat, diatur oleh seperangkat prinsip ekonominya sendiri. Mereka berpendapat bahwa pertukaran adalah situasi win-win, menguntungkan individu, rumah tangga, dan bisnis yang terlibat dalam transaksi pasar. Ekonomi berfungsi sebagai platform untuk kerja sama dan saling menguntungkan, baik antar negara maupun individu. Akibatnya, sistem

perdagangan bebas sangat penting untuk ekonomi global. Sepanjang abad ke-20 dan ke-21, banyak ekonom liberal menganjurkan intervensi pemerintah yang lebih besar di pasar. Ketika tingkat intervensi menurun dan perdagangan menjadi lebih signifikan, rezim kebijakan dipandang mengejar kebijakan liberalisasi. Kebijakan liberalisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pengurangan hambatan perdagangan atau penerapan subsidi ekspor.

Ada beberapa alasan mengapa negara atau badan hukum (*trafficker*) melakukan perdagangan internasional, salah satunya adalah sebagai sarana utama bagi suatu negara untuk mencapai kemakmuran dan kekuatan. Ini telah terbukti secara historis dalam perkembangan bangsa. Konsep kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara yang disebut juga dengan perdagangan internasional didorong oleh gagasan dan prinsip yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*". Menurut teori Smith, kesejahteraan warga suatu negara justru akan meningkat jika perdagangan internasional dilakukan di pasar global. Kunci untuk memfasilitasi perdagangan ini adalah intervensi pemerintah yang minimal.

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan "*Theory of Absolute Advantage*" ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap negara memiliki keunggulan yang berbeda dalam memproduksi barang atau komoditas tertentu dibandingkan dengan mitra dagangnya. Ketika suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi komoditas tertentu, negara tersebut akan mengekspor komoditas tersebut ke negara lain yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Melalui penerapan sistem perdagangan bebas, sumber daya akan dimanfaatkan secara lebih efektif, sehingga meningkatkan kemakmuran bagi semua bangsa.

Dalam penelitian yang berjudul “**Implikasi Kebijakan ASEAN Trade In Goods Agreement terhadap Peningkatan Perdagangan Di Negara-Negara ASEAN**” untuk menganalisis penelitian adalah dengan menggunakan salah satu teori hubungan internasional yaitu liberalisasi ekonomi, ASEAN merupakan aktor untuk memecahkan masalah ekonomi selain negara dikawasan Asia Tenggara. Dengan mengeluarkan kebijakan liberalisasi perdagangan dengan menjadikan pembuatan pergerakan kearah yang lebih netral dan terbuka. Dengan dibuatkannya kebijakan perdagangan ATIGA ini tentunya diharapkan oleh ASEAN adalah dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dikawasan. Dengan itu teori liberalisasi ekonomi ini akan membantu proses analisis dari penelitian.

### **2.2.2. Regionalisme**

Regionalisme merupakan konsep yang saat ini sedang diperbincangkan baik oleh para praktisi maupun akademisi di bidang hubungan internasional. Pembahasan ini sejalan dengan perubahan signifikan yang terjadi dalam hubungan global, di mana globalisasi telah membuat dunia menjadi lebih kecil dan lebih bersatu, sekaligus mengarah pada upaya untuk menciptakan kelompok negara yang lebih kecil dan bersatu.

Dalam istilah praktis, regionalisme sering digunakan secara bergantian dengan konsep wilayah, wilayah, subwilayah, atau subsistem. Namun, ada ketidaksepakatan di antara para sarjana hubungan internasional mengenai definisi regionalisme yang tepat. Joseph S. Nye, ahli teori hubungan internasional terkenal dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa konsep ini ambigu. Dia berpendapat,

pembagian wilayah berdasarkan aspek keamanan bisa berbeda dengan zona ekonomi (Joseph, 1968).

Secara teori, hubungan antara keamanan dan kawasan dapat dipahami dengan menggunakan konsep Ecological Triad, yang mempertimbangkan aktor, lingkungan, dan interaksi di antara mereka. Ini melibatkan negara-negara yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal mereka, dengan mempertimbangkan faktor geografis.

Menurut Buzan, daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan analisis peringkat, bertindak sebagai jembatan antara analisis negara dan sistem internasional. Buzan mengidentifikasi lima karakteristik suatu wilayah, termasuk kedekatan geografis, kesamaan sosiokultural, sikap dan tindakan politik, keanggotaan yang setara dalam organisasi internasional, dan ketergantungan ekonomi yang diukur dengan perdagangan luar negeri sebagai proporsi pendapatan nasional. Hubungan antara konsep keamanan dan kawasan dapat dipahami secara teoritis dengan menggunakan konsep Ecological Triad yang melibatkan aktor, lingkungan, dan hubungan di antara mereka. Dalam konteks ini, aktor, seperti negara, berinteraksi dengan lingkungan luarnya, mempertimbangkan aspek geografis yang dekat dan jauh (Buzan, 1991).

Wilayah didefinisikan sebagai dua atau lebih negara yang berinteraksi, berbagi budaya yang sama, dan memiliki hubungan sejarah. Mereka sering membentuk aliansi dengan daerah lain untuk meningkatkan pengaruhnya. Wilayah biasanya dibagi menjadi tiga bagian : Wilayah pusat suatu negara (*core sector*), wilayah terluar suatu negara (*peripheral sector*) dan negara eksternal wilayah yang

mampu masuk dalam interaksi wilayah (*intrusive system*) (Cantori & Spiegel, 1970).

Perubahan global telah menyebabkan regionalisme menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bersama, sementara regionalisme kategori ketiga (yang lebih bersifat *inward-looking* dan proteksionis) mulai berubah sebagai respons terhadap ekonomi dunia yang semakin saling bergantung. Sebaliknya, regionalisme baru cenderung lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Kategori keempat mengacu pada sejauh mana kerjasama regional.

Regionalisme terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, pengalaman historis atas masalah-masalah umum yang dihadapi oleh sekelompok negara dalam suatu latar geografis mempengaruhi tingkat interaksi antar aktor negara di suatu wilayah. Semakin besar sejarah bersama dan masalah yang dihadapi, semakin tinggi tingkat interaksinya. Hal ini karena kesamaan pengalaman dan tantangan sejarah mendorong berkembangnya kesadaran kedaerahan dan identitas kolektif. Konsekuensinya, banyak individu mengungkapkan keprihatinan tentang pembentukan kerjasama regional di Dunia Ketiga berdasarkan kesamaan sejarah akibat penjajahan, serta kesamaan dalam masalah ekonomi, sosial, dan politik yang mereka hadapi.

Proses regionalisme melibatkan beberapa tahapan. Awalnya, banyak negara setuju untuk berkolaborasi di bidang tertentu. Selanjutnya, mereka berusaha membangun saluran formal dan informal untuk mempromosikan kerja sama. Terakhir, kawasan ini mencapai tingkat integrasi dan pengakuan yang tinggi dari komunitas internasional. Regionalisme mengacu pada hubungan antar aktor yang terlibat dalam kerja sama regional. Bentuk regionalisme sebelumnya hanya

berfokus pada aktor negara, sedangkan bentuk baru mencakup berbagai aktor non-negara dalam interaksi regional. Konsekuensinya, dalam regionalisme baru, banyak aktor yang terlibat di samping mengatasi beragam masalah. (Louis & Andrew, 1995).

Kedua, ada hubungan yang kuat dan intim di antara mereka. Dalam istilah yang lebih sederhana, ada batas wilayah dalam interaksi mereka, juga dikenal sebagai “ *Spatial Dimension of Regionalism* “. Misalnya, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meliputi wilayah geografis Asia Tenggara, yang didirikan berdasarkan rasa takdir bersama yang mendorong keinginan untuk bekerjasama (Louis & Andrew, 1995).

Ketiga, penting untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat membentuk kerangka hukum dan kelembagaan untuk mengatur interaksi mereka dan memberikan seperangkat pedoman di dalam wilayah. Ini akan mendorong perkembangan tingkat pelebagaan tertentu di daerah tersebut (Louis & Andrew, 1995).

Integrasi ekonomi dianggap sebagai tingkat kerja sama tertinggi antara negara-negara ini. Jenis integrasi ini dapat dikategorikan menjadi dua tingkatan: integrasi dangkal (*shallow integration*) yang berfokus pada upaya regional untuk mengurangi hambatan perdagangan, dan integrasi mendalam (*deep*) yang bertujuan untuk integrasi ekonomi dan moneter penuh untuk mencapai kesatuan ekonomi (*full economic and monetary union integration*). Ada dua jenis regionalisme: interregionalisme dan transnasionalisme regional. Interregionalisme mengacu pada kerja sama antar wilayah untuk mencapai tujuan yang lebih besar, sementara transnasionalisme regional melibatkan kerja sama dengan aktor eksternal, seperti

perusahaan multinasional, yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan budaya yang sama. Interregionalisme juga mencakup perluasan hubungan antar daerah, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kerjasama antar organisasi internasional, serta hubungan bi-regional dan transregional antar daerah.

Dalam penelitian yang berjudul “**Implikasi Kebijakan ASEAN Trade In Goods Agreement terhadap Peningkatan Perdagangan Di Negara-Negara ASEAN**” untuk menganalisis penelitian dan mendukung teori sebelumnya maka penelitian ini menggunakan teori yang lain yaitu Regionalism. Karena ASEAN adalah sebuah organisasi kawasan yang terbentuk akibat adanya rasa senasib dan kedekatan geografis dengan mengutamakan kerjasama antara negara-negara anggota. Tujuan utamanya tidak lain adalah perdamaian dan kesejahteraan negara anggota dengan lebih banyaknya melakukan kerja sama ekonomi.

### **2.2.3. National Interest**

Menurut Frankel, kepentingan nasional objektif adalah kepentingan yang terkait dengan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa. Kepentingan ini dapat ditentukan oleh pembuat kebijakan melalui penyelidikan yang sistematis. Mereka memiliki signifikansi jangka panjang dan mencakup faktor-faktor seperti geografi, sejarah, tetangga, sumber daya, ukuran populasi, dan etnis. Di sisi lain, kepentingan nasional subyektif adalah kepentingan yang bergantung pada preferensi pemerintah atau elit kebijakan tertentu. Kepentingan ini meliputi ideologi, agama, dan identitas kelas. Mereka didasarkan pada interpretasi dan berpotensi berubah ketika pemerintah mengalami transformasi.



Mengingat bahwa catatan Frankel terutama berfokus pada substansi pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dan cenderung menunjukkan perilaku sadar diri daripada mengandalkan metode filosofis atau normatif (Frankel, 1970), perbedaan ini memiliki signifikansi dan makna. Diferensiasi ini juga diamati dalam studi yang lebih baru (George & Keohane, 1980). Dari sudut pandang konstruktivis, Jutta Weldes, misalnya, berpendapat bahwa konsep 'kepentingan nasional' memiliki dua arti penting dalam politik internasional.

Pembuat kebijakan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan luar negeri suatu negara sebagai dasar tindakan negara, yang disebut sebagai konsep kepentingan nasional. Konsekuensinya, konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar tindakan negara dalam praktiknya, tetapi juga berfungsi sebagai alat retorik yang menghasilkan legitimasi politik dan dukungan untuk tindakan tersebut. Oleh karena itu, pengertian 'kepentingan nasional' memiliki pengaruh yang signifikan karena memainkan peran penting dalam menetapkan pentingnya dan pembenaran upaya negara (Weldes, 1996).

Perbedaan tersebut memungkinkan Frankel untuk memeriksa aspek aspirasional dan operasional dari istilah tersebut, untuk menetapkan kriteria perbandingan yang permanen dan untuk menilai motivasi manusia di balik diplomasi internasional. Sebagai penjelasan tentang dimensi geopolitik, budaya, dan psikologis yang bersama-sama membentuk kepentingan nasional sebagai ekspresi kebijakan luar negeri, penjelasan Frankel hanya memiliki sedikit rekan, jika ada. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menantang klaim Frankel dengan menunjukkan bagaimana istilah "kepentingan nasional" dipahami secara beragam dalam aliran teori utama disiplin Hubungan Internasional. Dengan

memeriksa bagaimana teori politik internasional konvensional (realisme, liberalisme), progresif (Mazhab Inggris, konstruktivisme) dan kritis (Marxisme, anarkisme) memahami konsep kepentingan nasional, adalah mungkin untuk bergerak melampaui perhatian utama Frankel dengan pengambilan keputusan di kebijakan luar negeri untuk tujuan membandingkan dan membedakan kebijakan luar negeri.

Ada dua kepentingan berbeda yang berperan dalam hubungan saling keterikatan: kepentingan organisasi internasional dan kepentingan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi internasional berkepentingan untuk menjaga keseimbangan antara negara-negara yang terikat satu sama lain, itulah sebabnya mereka bekerja untuk memastikan bahwa kesepakatan di antara mereka dipatuhi. Namun, dalam hubungan keterikatan, masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing yang harus dijaga dan dipertahankan.

Dalam penelitian yang berjudul “**Implikasi Kebijakan ASEAN Trade In Goods Agreement terhadap Peningkatan Perdagangan Di Negara-Negara ASEAN**” untuk menganalisis penelitian dan mendukung teori sebelumnya teori kepentingan nasional dianggap mampu dalam membantu menganalisis penelitian dengan melihat bagaimana negara anggota ASEAN memiliki kepentingan nasional yang sama dan terikat ke dalam organisasi kawasan dengan tetap menjaga keseimbangan dan meningkatkan perekonomian negaranya terutama kawasan.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan dari literatur yang digunakan peneliti sebagai sumber dan pembanding, peneliti membuat sebuah asumsi **Bahwa dengan adanya Kebijakan**

***ASEAN Trade In Goods Agreement*** akan meningkatkan perdagangan di negara-negara ASEAN. Dengan menghilangkan tarif di hampir semua produk membuka peluang bagi keluar masuk suatu barang di negara anggota juga dengan mengizinkan faktor pada pihak ketiga dan kumulasi ASEAN membuat perekonomian di kawasan menjadi terintegrasi dan kemakmuran dalam meningkatkan ekonomi di kawasan.

#### 2.4. Kerangka Analisis

